

Tersangka Perdin

Dewan Kota Ditah

Patra: Tidak, Sava Tidak Menikmati

DENPASAR - Kamis (21/7) malam kemarin menjadi hari tak terlupakan bagi I Gusti Made Patra. Tepat saat magrib, pukul 18.30, pria yang baru saja pensiun sebagai PNS itu ditahan Kejari Denpasar. Patra dijadikan tersangka dugaan korupsi dana per-jalanan dinas (perdin) DPRD Kota

Denpasar Tahun 2013.

Patra diperiksa lima jam lebih di ruang pidana khusus (Pidsus) di lantai dua Kejari Denpasar. Begitu turun dari lantai dua, Patra yang dikawal petugas kejaksaan sudah mengenakan rompi oranye. Pria paro baya itu terus menutupi wajahnya dengan tas punggung warna hitam. Selama 20 hari mendatang dia akan meringkuk dibalik sel Lapas Kerobokan. Akibat korupsi perdin ini, kerugian negara disebut-sebut lebih Rp 400 juta.

Tidak banyak kata-kata yang keluar dari mulut Patra. Saat dicecar awak media dengan berbagai pertanyaan dia bungkam. Namun, ketika ditanya apakah benar dia korupsi dan menikmati aliran dana perjalanan dinas, Patra langsung membantah. "Tidak,

tidak ada (menikmati uang)," cetus Patra sambil masuk ke mobil tahanan kejaksaan nomor polisi B 8760 ZQ. Apakah Anda merasa jadi tumbal? "Tidak tahu," jawabnya singkat.

Sementara kuasa hukum Patra; Ketut Rinata ditemui terpisah mengatakan, kliennya tidak terlibat korupsi dan tidak menikmati

uang perdin. Patra selama ini hanya sebagai pencatat administrasi. Patra menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perdin. "Dia hanya bagian administrasi. Bagian tukang catat. Saya yakin dia tak menerima uang, tandas Rinata membela kliennya.

Lalu siapa yang harus bertanggung awab? Rinata dengan lantang menyebut yang bertanggung jawab seharusnya Bagian Keuangan Setwan Kota Denpasar. Sebab, Bagian Keuangan yang bersentuhan langsung dengan aliran dana. "Harusnya Bagian Keuangan yang bertanggungjawab," tukasnya seraya mengaku akan mengajukan penangguhan penahanan untuk Patra.

Sementara itu, ditemui sebelum penahanan Patra, Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir mengungkapkan, penetapan tersangka Patra ber-dasarkan pemeriksaan maraton yang dilakukan jaksa penyidik selama ini. Namun, saat disinggung ada tersangka baru menyusul, Syahrir mengaku tidak bisa memastikan. "Ya lihat saja nanti seperti apa. Kan, pemeriksaan masih terus berlanjut," papar Syahrir.

Mereka yang akan diperiksa adalah anggota dewan dan pihak terkait dalam perdin. Sebelumnya sekwan, lima anggota dewan dan dua orang dari Bali Travel Daksina serta satu orang dari Sunda Travel sudah diperiksa.

Terkait kerugian negara, Syahrir menyebut cukup besar. Bahkan, awalnya penghitungan kejaksaan tidak sampai Rp 1 miliar. Namun, setelah ada hasil audit BPKP Bali, ternyata kerugian negara membengkak tiga kali lipat dari penghitungan awal kejaksaan. Didesak angka kerugian, Śyahrir menyebut angkanya cukup besar. "Hasil audit BPKP sudah ada, cuma secara resmi belum. Perhitungan kerugian kami kecil tidak sampai Rp 1 miliar, ternyata setelah diaudit BPKP tiga kali lipat," tandas Syahrir. (san/den/yor)



MALU: Tersangka korupsi perdin DPRD Kota Denpasar I Gusti Made Patra menutup wajah saat ditahan Kejari Denpasar kemarin. Patra saat di dalam mobil tahanan (insert).

: Juntat, 27 Juli 2016 Edisi

: 25 Hal



Kepala Smanab Dipanggil Disdik

MANGUPURA - Dugaan penyelewengan dana komite di SMAN 1 Abiansemal (Smanab) juga direspons Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Badung. Bahkan, dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah itu untuk bisa diungkap tuntas sehingga tidak lagi terjadi permasalahan di tingkat komite. Bahkan, Kepala Smanab pun dipanggil kemarin.

Kadisdikpora Badung Ketut Widia Astika mengaku telah memperingatkan Kepala Smanab mengenai kegaduhan komite di Smanab tersebut. "Kami juga minta tolong kepada ketua Komisi IV DPRD Badung untuk mengungkap itu. Kami tidak ada maksud apa-

apa dengan kepala sekolah dan juga komite," jelasnya

Pun begitu, pihaknya ingin menegakkan aturan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan ndmor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kepengurusan komite sekolah ini mesti meregenerasi dan sesuai dengan surat keputusan menteri tersebut pengurus komite maksimal bisa diangkat dua kali periode. Selain itu kontrol dan pertanggungjawaban dana komite juga harus jelas dan transparan. "Kita bicara aturan, mari kita terapkan. Misalnya ketua komite tidak pernah diganti itu ada apa? Pasti akan muncul pertanyaan dan juga kecurigaan," terangnya menyinggung pengurus komite Smanab yang sudah berkali-kali tanpa diganti itu.

Diketahui, pemanfaatan dana komite tahun ajaran 2015/2016 senilai Rp 2,6 miliar diduga terjadi penyelewengan. Dana komite itu dipakai untuk kegiatan yang mestinya sudah dibiayai melalui anggaran pemerintah, maupun kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Contohnya THR Galungan, juga biaya optimalisasi yang tak jelas peruntukannya. Penggunaan ini dikeluhkan oleh orang tua siswa, karena penggunaannya tidak masuk akal.

"Guru sekarang harus ketat dan

bekerja ekstra. Kalau memang penggunaannya (dana komite) untuk peningkatan mutu pembelajaran dan disetujui oleh orang tua siswa itu tak masalah. Takutnya, nanti ada jam pelajaran tapi tidak ada kegiatan, bahaya itu. Artinya programnya terukur, orang tua murid sudah mempelajari itu dan programnya realistis," tegasnya.

Imbuhnya, mengenai kegaduhan dana komite di Smanab ini akan dirapatkan lagi pihak sekolah bersama komite sekolah. "Kita ambil hikmahnya. Bagaimana mengelola dana, bukan hanya dana komite. Bahkan dana BOS juga sekarang ketat dipergunakan,"

ungkapnya. (dwi/yor)

Edisi : Jumal, 22 July 2016

Hal : 25



Kepala Proyek Dijebloskan ke Kerobokan

DENPASAR - Parno Tris Hadiono, harus merasakan pengapnya sel Lapas Kerobokan. Parno yang juga kepala proyek konstruksi jaringan air minum dan air bersih pengadaan air minum di Keca-matan Abang, Manggis dan Kubu, Karangasem itu ditetapkan sebagai tersangka usai pelimpahan tahap II dari Polda Bali.

Parno diperiksa dua jam lebih oleh jaksa penyidik Kejati Bali. Setelah diperiksa, Parno dikawal jaksa penyidik dan pengacaranya digiring menuju mobil Toyota Avanza DK 1265 AB warna biru. Staf PT Adhi Karya, itu terus menghindari jepretan kamera. Parno yang memakai masker



DILIMPAHKAN : Parno Tris Hadiono (baju putih) kemarin dijebloskan ke Lapas Kerobokan gara-gara kasus proyek air minum Karangasem.

terus berlindung di balik badan gemuk jaksa Suardi.

Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Parno. Dia memilih bungkam saat coba dikejar awak media. "Tersangka dititipkan di Lapas Kerobokan selama 20 hari," ujar Aspidsus Kejati Bali Polin Sitanggang didampingi Humas dan Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan

► Baca **Kepala...** Hal 31

Bisa Diperpanjanş

■ KEPALA

Sambungan dari hal 23

Terkait penahanan Parno di Lapas Kerobokan, Polin menyebut untuk efisiensi selama persidangan. Sebab, jika ditahan di Karangasem dibutuhkan dana besar saat antar jemput tersangka. "Penahanan akan diperpanjang jika diperlukan," imbuhnya.

Dijelaskan lebih jauh, penetapan tersangka Parno berdasarkan pengembangan kasus sebel-

umnya yang sudah memidanakan tiga terdakwa. Yakni mantan Kepala PT Adhi Karya Divisi VII Imam Wijaya Santosa (divonis 2 tahun penjara), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) IB Made Oka (divonis penjara 1 tahun), dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem I Nyoman Arnawa yang juga berperan sebagai pengguna anggaran dalam proyek ini divonis 1,5 tahun penjara. "Tersangka saat ini hasil split terdakwa sebelumnya," tandas Ashari. (san/pit)

: Jumbt, 22 Juli 2016 Edisi

: 23 Jan 31 Hal



Dewan Tuding Anggaran Masih Kurang

DENPASAR – Meski anggaran perbaikan jalan dalam RAPBD Perubahan tahun 2016 meningkat, DPRD Kota Denpasar menganggap itu masih kurang. Pasalnya, antara kebutuhan dan dana yang disediakan masih teramat pincang.

Anggota DPRD Denpasar, A.A Susruta Ngurah Putra kepada *Jawa Pos Radar Bali* Kamis kemarin (21/7) menyebutkan, anggaran perbaikan jalan di APBD induk 2016 sebesar Rp 68,2 miliar. Naik menjadi Rp 102,8 miliar. Meski ada penaikan anggaran dengan total Rp 34,6 miliar, baginya hal tersebut masih kurang. "Kan masih banyak tuh jalan yang rusak, termasuk di LC," tuturnya.

Dia pun berharap anggaran perbaikan infrastruktur jalan di tahun ke depan bisa dinaikkan demi kenyamanan masyarakat Kota Denpasar. Diketahui sebelumnya, jalan rusak di Denpasar di tahun 2015 masih sepanjang 73,199 m dari total jalan kota 486,084 kilometer. Kebutuhan untuk perbaikan jalan itu menurut Dinas PU Denpasar sebesar Rp 400 miliar.

"Dalam pandangan kami, melihat data

yang ada, kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan memang perlu dinaikkan karena banyaknya jalan yang rusak," ungkapnya.

Di sisi lain, Susruta juga mengkritisi turunnya anggaran pemeliharaan jalan. Di APBD perubahan hanya Rp 7,2 miliar. Turun dari Rp 9 miliar di anggaran sebelumnya.

Sebelumnya Kabag Humas IB Rahoela mengaku Pemkot Denpasar memiliki keterbatasan dana untuk perbaikan jalan. Dalihnya lagi, dalam pembangunan ada skala prioritas. (ara/yor)

Edisi : 25 | 1011 2014 | Hal : 25